



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : STEIVIE KAROUW
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 789293

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.610.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m ² /110 m ² di KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m ² /140 m ² di MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
3. Tanah Seluas 672 m ² di MINAHASA, WARISAN Rp. 260.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	245.000.000
1. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	87.976.591
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.942.976.591
III. HUTANG	Rp.	575.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.367.976.591

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENGELBERT MANAROINSONG
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 226502

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	75.000.000
1. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	150.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOBIL, DAIHATSU FEROZA Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	12.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	695.465.729
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	933.165.729
III. HUTANG	Rp.	215.693.113
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	717.472.616

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEYSI MOONIK
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 799152

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 365.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/36 m² di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m²/36 m² di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 135.000.000

1. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.750.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.792.356

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 518.542.356

III. HUTANG Rp. 53.890.738

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 464.651.618

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.